

BAB III

HUBUNGAN ANTARA UNI EROPA DAN UKRAINA

Dalam bab ini penulis akan membahas secara komprehensif tentang sejarah hubungan Uni Eropa dan Ukraina dan membahas kebijakan utama Uni Eropa untuk Ukraina yaitu ENP.

A. Hubungan Uni Eropa dan Ukraina

Uni Eropa mendukung Ukraina dalam memastikan masa depan yang stabil, sejahtera dan demokratis bagi semua warganya. Uni Eropa tidak tergoyahkan dalam mendukung integritas dan kedaulatan teritorial negara itu dan melihat implementasi penuh perjanjian Minsk sebagai dasar solusi politik yang berkelanjutan terhadap konflik di timur negara itu. Sejak musim semi 2014, UE telah meningkatkan dukungannya untuk reformasi ekonomi dan politik di Ukraina. (Action, European Union External Action, 2016)

Ukraina adalah mitra prioritas untuk Uni Eropa juga dalam Kemitraan Timur Uni Eropa. Perjanjian Asosiasi, termasuk Kawasan Perdagangan Bebas Dalam dan Komprehensif (DCFTA) antara Uni Eropa dan Ukraina dinegosiasikan antara 2007 dan 2011 dan ditandatangani pada 21 Maret dan 27 Juni 2014. Ini menggantikan kerangka kerja sebelumnya untuk kerja sama. Perjanjian Asosiasi adalah alat utama untuk membawa Ukraina dan Uni Eropa lebih dekat: mempromosikan hubungan politik yang lebih dalam, hubungan ekonomi yang lebih kuat dan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama.

Bagian dari Perjanjian Asosiasi telah diterapkan sejak 1 November 2014. Hal ini telah meningkatkan kerjasama Uni Eropa-Ukraina tentang hak asasi manusia, kebebasan dasar dan supremasi hukum; dialog politik dan reformasi; pergerakan orang; dan memperkuat kerjasama di sejumlah sektor, termasuk, energi; lingkungan dan aksi iklim; mengangkut; jasa keuangan; keuangan publik, termasuk anti-penipuan; pertanian dan pembangunan pedesaan; kebijakan perikanan dan kelautan; perlindungan konsumen dan masyarakat sipil.

Pada bulan Juli 2017 proses ratifikasi Perjanjian Asosiasi di sisi Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya selesai yang memungkinkan Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Ukraina juga merupakan negara mitra utama dalam ENP dan Kemitraan Timur yang terakhir melibatkan semua negara Uni Eropa serta Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republik Moldova dan Ukraina. Diskusi reguler diadakan mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, termasuk melalui KTT Uni Eropa-Ukraina yang diadakan setiap tahun.

Pada 1 September 2017, Perjanjian Asosiasi UE-Ukraina datang dengan kekuatan penuh. Perjanjian Asosiasi termasuk bagian Perdagangan Bebas Mendalam dan Komprehensif (DCFTA) adalah alat utama untuk membawa Ukraina dan Uni Eropa lebih dekat. The DCFTA menawarkan Ukraina kerangka kerja untuk memodernisasi hubungan perdagangan dan untuk pembangunan ekonomi dengan membuka pasar dan harmonisasi hukum, standar dan peraturan di berbagai sektor. Ini akan membantu menyelaraskan sektor-sektor utama ekonomi Ukraina dengan standar Uni Eropa.

DCFTA telah diterapkan sejak 1 Januari 2016 merupakan tonggak utama dalam hubungan perdagangan bilateral dan menawarkan peluang ekonomi baru baik bagi UE maupun Ukraina. Bisnis Ukraina menerima akses preferensial yang stabil dan dapat diprediksi ke pasar terbesar di dunia, dengan lebih dari 500 juta konsumen. Bisnis UE dapat memperoleh manfaat dari akses yang lebih mudah ke pasar Ukraina dan membangun hubungan baru dengan pemasok dan mitra Ukraina.

Pada 1 Oktober 2017 langkah-langkah perdagangan otonom tambahan dari Uni Eropa untuk Ukraina mulai berlaku. Peraturan Uni Eropa tentang langkah-langkah memuncak kuantitas produk pertanian yang Ukraina dapat mengeksport ke Uni Eropa di bawah Perjanjian Asosiasi tanpa membayar bea masuk. Ini juga mempercepat penghapusan tarif impor Uni Eropa untuk beberapa produk industri seperti yang diramalkan dalam Perjanjian Asosiasi.

Hasil konkret pertama dari implementasi DCFTA sudah dapat dilihat: pada paruh pertama tahun 2017 - menurut Eurostat - perdagangan barang antara Uni Eropa dan Ukraina meningkat sebesar 23% dan Uni Eropa terus memperkuat posisinya sebagai mitra dagang pertama Ukraina, secara keseluruhan Uni Eropa menyumbang sekitar 40% dari total ekspor Ukraina.

Produk utama Ekspor Ukraina ke UE adalah logam dasar dan barang seperti produk nabati, produk mineral, mesin dan peralatan listrik, lemak nabati dan minyak. Produk utama ekspor UE ke Ukraina adalah mesin dan peralatan, produk industri kimia, peralatan transportasi, plastik, karet dan barang daripadanya dan produk mineral.

Perdagangan luar negeri dan investasi sangat penting bagi ekonomi Ukraina dan Uni Eropa dalam hal pertumbuhan dan pekerjaan, harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik dan pilihan yang lebih besar bagi konsumen melalui peningkatan persaingan dan seterusnya.

Uni Eropa dan Ukraina terus bekerja untuk memastikan peluang dan manfaat bagi UE dan bisnis Ukraina dalam kerangka DCFTA.

Sejak musim semi 2014, Ukraina telah memulai jadwal reformasi ambisius yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian warganya. Ukraina dan UE secara bersama-sama mendefinisikan agenda reformasi (Agenda Asosiasi, yang terakhir diperbarui pada Maret 2015) dan mengikuti perkembangan ini dengan seksama. Perjuangan melawan korupsi, mereformasi peradilan, reformasi konstitusional dan elektoral, peningkatan iklim bisnis, dan reformasi administrasi publik, termasuk desentralisasi, adalah salah satu prioritas utama dalam agenda.

Selain dukungan politik, Uni Eropa telah menjanjikan paket dukungan € 12,8 miliar untuk beberapa tahun ke depan untuk mendukung proses reformasi.

1. Program-program yang dilaksanakan dan di bawah implementasi termasuk, antara lain:
 - a. € 3,41 miliar dalam bentuk pinjaman sebagai bantuan keuangan makro Uni Eropa (MFA), yang € 2,81 miliar

telah disediakan. Ini adalah jumlah bantuan makro-finansial terbesar yang telah disalurkan UE ke negara non-UE. Ukraina akan dapat memperoleh manfaat dari pembayaran € 600 juta terakhir berdasarkan program MFA ketiga tunduk pada keberhasilan penerapan langkah-langkah yang ditentukan dalam nota kesepahaman bersama yang disetujui bersama oleh Ukraina dan Uni Eropa.

2. € 3 miliar dalam bentuk pinjaman yang ditandatangani oleh Bank Investasi Eropa (EIB) antara 2014 dan akhir 2016 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan reformasi di sektor transportasi, energi, pertanian, pendidikan dan kota serta dukungan finansial dan teknis yang besar untuk UKM pengembangan. Sebuah Nota Kesepahaman telah disepakati dengan Pemerintah Ukraina tentang investasi EIB di masa depan.
3. € 2,7 miliar dalam investasi dari 2014-2016 dari Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, berkat dukungan dari Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya termasuk sebagai donor untuk membantu mengembangkan dan mereformasi antara lain, sektor perbankan, agribisnis, dan usaha kecil di Ukraina termasuk memfasilitasi pembelian \$ 300 juta gas untuk musim pemanasan 2015-2016. Ini merupakan tambahan untuk proyek keselamatan nuklir.
4. € 879,2 juta dalam bentuk hibah termasuk:
 - a. € 355 juta kontrak pembangunan negara yang mendukung perang melawan korupsi serta reformasi administrasi publik, peradilan, konstitusi dan kerangka elektoral.
 - b. Program masyarakat sipil senilai € 10 juta untuk memperkuat kapasitasnya untuk mendukung dan memantau proses reformasi.
 - c. Program € 110 juta ditujukan untuk mengembangkan sektor swasta dan mendorong pemulihan ekonomi Ukraina. Bantuan teknis diberikan untuk meningkatkan kerangka kerja legislatif untuk UKM dan mempromosikan pelaksanaan Perjanjian Asosiasi

- sementara UE mendukung pengaturan pusat penasihat bisnis di daerah dan memfasilitasi akses UKM untuk membiayai.
- d. Program desentralisasi senilai € 90 juta untuk mendukung pemerintahan lokal. Pihak berwenang setempat menerima saran dan dukungan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap kebutuhan penduduk. Pengiriman layanan administrasi lokal di seluruh Ukraina sedang ditingkatkan.
 - e. Program anti korupsi senilai € 15 juta yang mendukung lembaga antikorupsi yang baru dibentuk, memperkuat pengawasan dan kapasitas parlemen dari masyarakat sipil dan media independen untuk berkontribusi dalam perang melawan korupsi.
 - f. Fasilitas kerjasama teknis € 28,5 dan € 37,5 juta (masing-masing pada tahun 2016 dan 2017) untuk meningkatkan kapasitas otoritas publik Ukraina dalam merancang dan mengimplementasikan reformasi utama dan mendukung pelaksanaan Perjanjian Asosiasi.
 - g. Program Reformasi Administrasi Publik senilai € 104 juta untuk membantu menempatkan generasi baru pegawai negeri Ukraina, mengatur pemerintah sesuai dengan standar Eropa, menerapkan praktik terbaik dalam pembuatan kebijakan dan memajukan reformasi sektor kunci.
 - h. Program Rule of Law senilai € 52,5 juta memberikan dukungan untuk reformasi peradilan dan penegakan hukum.
 - i. € 76,7 juta dari Instrumen yang berkontribusi untuk Stabilitas dan Perdamaian (ICSP) mulai 2014 dan seterusnya untuk mendukung pemantauan pemilu dan langkah-langkah membangun kepercayaan, Misi Pemantauan Khusus OSCE, Pengungsi Internal (IDP), populasi yang terkena dampak konflik, pemulihan pemerintahan dan rekonsiliasi di komunitas yang terkena dampak krisis serta reformasi kepolisian.

5. Program European Neighborhood Instrument 2017 selanjutnya untuk total anggaran € 200 juta di bidang efisiensi energi, manajemen keuangan publik dan dukungan ke daerah-daerah yang terkena dampak konflik di Ukraina timur di bawah kendali pemerintah, yang akan diadopsi sebelum akhir tahun ini.

Dialog masyarakat sipil melalui konsultasi online, bagian dari situs web memungkinkan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memberikan pandangan mereka tentang bagaimana hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa akan berkembang di masa depan. Untuk mengambil bagian, organisasi dapat mendaftar online.

Database kontributor akan membantu Delegasi melihat siapa yang tertarik pada aspek kebijakan yang berbeda sehingga konsultasi yang lebih terfokus dapat dilakukan di masa depan. Karena basis data akan berada di domain publik, itu juga akan memastikan bahwa kontribusi organisasi dibuat secara transparan.

Topik dapat mencakup diskusi tentang draf dokumen politik dan operasional, konsultasi mengenai inisiatif ad hoc atau penetapan prioritas dalam program yang menarik khusus untuk masyarakat sipil. Semua kontribusi untuk konsultasi individu tersedia di situs web. Komisi juga memposting umpan balik di situs web memungkinkan kami untuk membuat catatan interaksi yang produktif dan berguna antara Komisi Eropa dan masyarakat sipil.

Roadmap Negara Uni Eropa untuk Keterlibatan dengan Masyarakat Sipil di Ukraina. Delegasi Uni Eropa, bersama dengan negara-negara UE dan dalam konsultasi dengan masyarakat sipil dan otoritas nasional, mengembangkan Roadmap Negara UE untuk Keterlibatan dengan Masyarakat Sipil di Ukraina. Roadmap mengidentifikasi delapan prioritas jangka panjang untuk kerja sama dan koordinasi di bidang ini. Prioritas mencakup lingkungan yang memungkinkan, analisis kebijakan, legitimasi, Perjanjian Asosiasi, konflik, akuntabilitas, hak

asasi manusia, pembangunan ekonomi dan banyak bidang lain yang menjadi perhatian CSO.

Uni Eropa berada di garis depan dalam menanggapi krisis kemanusiaan akibat konflik di Timur Ukraina. Kebutuhan kemanusiaan masih tinggi: 3,8 juta orang diperkirakan membutuhkan.

Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya telah memberikan dukungan keuangan kepada orang-orang yang paling rentan. Bantuan kemanusiaan berjumlah € 222 juta dimana € 88,1 juta telah disediakan oleh UE. Pendanaan ini memberikan dukungan kepada orang-orang yang paling rentan yang terkena dampak konflik di daerah-daerah yang dikuasai non-pemerintah dan di sepanjang kedua sisi garis kontak. Bantuan ini membahas kebutuhan dasar mereka yang paling terkena dampak konflik di mana pun mereka berada. Ini termasuk penyediaan tempat penampungan, perawatan kesehatan, perlindungan, makanan dan non-makanan, air, sanitasi dan bantuan darurat lainnya. Jika kondisi yang tepat tersedia bantuan diberikan melalui uang tunai dan voucher.

Selain itu, kontribusi UE untuk operasi pemulihan awal dan peace building total € 177million. Operasi pemulihan awal meliputi pekerjaan perbaikan kecil; kegiatan untuk mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi dari para pengungsi internal (IDP) dan untuk membangun hubungan dengan komunitas tuan rumah; kegiatan pendidikan risiko ranjau; dukungan psikososial untuk komunitas yang terpengaruh konflik.

Bantuan tersebut disampaikan melalui organisasi mitra kemanusiaan Komisi, termasuk Orang-Orang yang Membutuhkan (PIN), ICRC, ACF, ACTED, UNHCR, Save the Children, Premiere Urgence International, MDM, DRC, NRC, OCHA dan UNICEF.

B. European Neighbourhood Policy sebagai Kebijakan Utama untuk Ukraina

European Neighbourhood Policy yang disingkat ENP adalah sebuah kebijakan dari Uni Eropa untuk mengatasi negara – negara yang berada di pinggiran negara eropa dalam rangka reformasi ekonomi dan perdagangan, kebijakan imigrasi, reformasi institusional, penelitian terpadu dan pendidikan tinggi untuk sebuah tujuan besar yaitu membuat lingkaran kestabilan, harmonis dan negara makmur di sekitar Uni Eropa.

Kebijakan ini di buat pada tahun 2004 dengan isinya merupakan pembaharuan-pembaharuan kebijakan Uni Eropa yang sebelumnya terkait dengan negara pinggiran yang lebih populer disebut border country seperti kebijakan TACIS, MEDA, PHARE yang semuanya itu merupakan kebijakan Uni Eropa untuk negara-negara yang berada di sekitar Uni Eropa. (Edzard Wesselink, 2012)

Lima belas tahun yang lalu, ada sebuah perubahan radikal dalam jumlah negara yang mengelilingi Uni Eropa, ada beberapa pembangunan positif seperti aktor lokal menginisiasi reformasi tentang penegakan hukum, keadilan sosial, meningkatkan akuntabilitas, sebagaimana yang di contohkan oleh penerima Nobel Perdamaian yaitu Tunisian Quartet. Sedangkan pada waktu yang sama terjadi konflik, berkembangnya ekstrimisme dan terorisme, pelanggaran hak asasi manusia dan tantangan hukum yang lainnya serta pergolakan ekonomi dalam arus pengungsi yang besar, kemudian negara di sekeliling Uni Eropa melihat Uni Eropa sebagai masa depan.

Sementara itu, Uni Eropa memiliki interdependensi dengan negara – negara tetangganya dalam fokus yang lebih tajam. Pesatnya arus pengungsi ke Uni Eropa untuk menemukan masa depan yang baik berimplikasi pada krisis energi, untuk mengatasi krisis energi ini perlu bekerjasama dengan negara tetangga dalam hal pengamanan energi berupa diversifikasi sumber energi, jalur penyaluran, pemasok serta transfer tenaga kerja.

Orientasi pragmatis dari ENP adalah menekankan perluasan perdagangan dan hubungan ekonomi. Hal ini terjadi

seperti halnya kebijakan asosiasi klasik di Komisi Eropa dengan tujuan menciptakan antara komisi eropa dan negara – negara tetangganya, kawasan perdagangan bebas untuk barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat diperluas dari yang sifatnya bilateral ke multilateral melalui integrasi lebih lanjut di masing – masing tetangga.

ENP yang pertama kali ini sebenarnya ditawarkan untuk membuat kerangka kerjasama inovatif antara Uni Eropa terhadap TACIS (Technical Assistance to The Commonwealth od Independent States) yaitu program bantuan untuk negara-negara bekas komunis yang baru merdeka yang dibentuk tahun 1992, MEDA (Negara Mediterania), serta negara di selatan Kaukasus. Anggota ENP selain Uni Eropa saat didirikan pertama kali ialah : Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Georgia, Israel, Yordania, Lebanon, Libya, Moldova, Maroko, Otoritas Palestina, Suriah, Tunisia dan Ukraina. Sampai tahun 2005 Uni Eropa memasukkan 10 negara baru yang bertujuan untuk membangun “Wider Europe”, yaitu sebuah kawasan geografi yang stabil dan aman dengan ENP tersebut. (Raffaella A. Del Sarto, 2005).

Untuk menjadi negara yang masuk dalam ENP, negara-negara kandidat harus memenuhi syarat dan kriteria yang diberlakukan oleh Uni Eropa sesuai dengan kriteria Kopenhagen, dalam kriteria kopenhagen atau yang lebih populer Copenhagen Criteria yang isinya adalah suatu negara layak untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan syarat sebuah negara harus mempunyai institusi untuk melindungi pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia, memiliki ekonomi pasar yang berfungsi, dan menerima kewajiban dan tujuan Uni Eropa.

Kriteria ini di tetapkan pada pertemuan dewan eropa di Kopenhagen, Denmark pada Juni 1993. (Council, 1993). Sebelum perluasan, negara-negara kandidat memang diwajibkan untuk mengadopsi kriteria Kopenhagen dan proses ini akan membantu negara-negara (kandidat dan non-kandidat) untuk mendemokratisasikan institusi mereka. Setelah perluasan tersebut, Uni Eropa bertujuan untuk memiliki hubungan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial dengan negara

tetangga baru seperti Ukraina, Rusia, Georgia, Tunisia, Maroko, Israel dan Otoritas Palestina.

Melalui ENP, Uni Eropa memberikan bantuan demi mencapai cita-citanya untuk memperluas Eropanisasi, ide-ide Eropa, nilai-nilai dan kebijakan untuk negara-negara tanpa perspektif keanggotaan.

Dalam jangka pendek, ENP memfasilitasi integrasi ekonomi ke pasar Uni Eropa, dan mencapai empat kebebasan gerakan fundamental, yakni orang, barang, jasa dan modal dalam jangka panjang. Melalui hal ini maka akan lebih mudah untuk mewujudkan demokratisasi sebelum terjadinya proses keanggotaan Uni Eropa, namun, negara-negara tetangga juga tetap diharapkan untuk mewujudkan demokratisasi meski masih berada dalam kerangka kemitraan dengan Uni Eropa. Jadi, selain Uni Eropa mengeluarkan ENP dari perspektif keamanan, tetapi juga secara tidak langsung Uni Eropa mempromosikan demokrasi di Negara-negara tetangga dengan tindakan-tindakan bantuan ekonomi maupun militer yang diberikan Uni Eropa (Goksel, 2017)

ENP dapat dilihat sebagai kelanjutan dari logika pembesaran dengan alat dan instrumen yang sama namun ujung politik yang berbeda, ENP berbeda dari proses perluasan Uni Eropa karena tidak termasuk prospek keanggotaan untuk mitra. Meskipun tidak adanya perspektif keanggotaan, ENP berbagi tujuan penting dengan pembesaran: untuk mendorong mitra memulai proses "Europeanization" yang didefinisikan sebagai transformasi multi-dimensi politik, ekonomi dan sosial. Cukup dikatakan, ENP adalah kebijakan Europeanisasi tanpa atau sebelum akses penuh.